



Commodities and Forests

Agenda 2020: Sepuluh prioritas untuk menghilangkan deforestasi hutan tropis dari rantai pasokan komoditas

September 2017



Ringkasan Eksekutif

Deforestasi harus dihentikan jika kita ingin menghindari dampak terburuk dari perubahan iklim global. Untuk dapat membatasi naiknya temperatur global seperti yang telah dibicarakan dalam Perjanjian Paris tentang perubahan iklim, emisi yang disebabkan oleh penggunaan lahan harus memuncak di 2020 lalu menurun di tahun-tahun berikutnya. Penghentian deforestasi di area tropis adalah langkah yang sangat krusial untuk mencapai tujuan ini. Perusakan hutan telah mengakibatkan emisi gas rumah kaca yang setara dengan emisi global perjalanan darat. Saat ini, penggundulan hutan sedang terus meningkat di skala yang mengkhawatirkan dengan area deforestasi yang setara dengan luasnya negara Africa Selatan antara tahun 1990 dan 2015.

Gerakan untuk menghentikan deforestasi di tahun 2020 telah muncul dan terkait erat dengan rantai pasokan komoditas pertanian global. Pertanian komersial bertanggung jawab atas lebih dari setengah deforestasi yang terjadi, karena membuka lahan untuk memproduksi komoditas yang digunakan sebagai bahan konsumen sehari-hari. Pada bulan September 2017, lebih dari 470 sektor bisnis terkemuka telah membuat komitmen untuk mengurangi atau menurunkan laju deforestasi dalam rantai pasokan mereka, melalui perbaikan dalam praktik-praktik produksi dan pengadaan. Pada tahun 2010, Consumer Goods Forum berkomitmen untuk mencapai zero net deforestation dalam rantai pasokan daging sapi, kedelai, minyak kelapa sawit, serta kertas dan pulp pada tahun 2020. Pada tahun 2014, lebih dari 190 wakil pemerintah, non-pemerintah dan perusahaan berkomitmen menandatangani New York Declaration on Forests mendorong komoditas pertanian untuk menurunkan semua laju deforestasi pada tahun pada tahun 2020,

Gerakan ini harus menambah lagi upaya dan kecepatan demi pencapaian tujuan-tujuannya. Walaupun saat ini merupakan momentum yang sangat kuat. Laporan ini-*Commodities and Forests Agenda 2020*—menjabarkan 10 area prioritas yang harus menjadi fokus para eksekutif perusahaan, pembuat kebijakan dan pemimpin masyarakat sipil untuk mempercepat kemajuan dalam menangani deforestasi yang didorong oleh komoditas. Sepuluh prioritas untuk ditindaki adalah:

1. Menurunkan laju rantai pasokan ilegal

Perusahaan memiliki peluang yang besar untuk membantu menurunkan laju deforestasi dengan melalui rantai pasokan pertanian ilegal. Pembukaan hutan ilegal bertanggung jawab atas hampir setengah dari keseluruhan deforestasi yang terjadi di hutan tropis. Dengan dijalanannya kepatuhan terhadap Brazil Forest Code saja, 150 juta hektar hutan tropis akan dapat diselamatkan dan kawasan tutupan hutan akan bertambah hingga lebih dari 15% pada tahun 2050. Pada akhirnya, dengan diperkuatnya kebijakan, kerangka kerja hukum yang lebih baik dan penegakan hukum yang lebih efektif merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah, di mana perusahaan dapat mendukung upaya-upaya tersebut dengan cara memperbaiki pemantauan terhadap kepatuhan hukum dalam rantai pasokan mereka sendiri.

2. Mengembangkan dan memperkuat sertifikasi minyak kelapa sawit

Sertifikasi minyak kelapa sawit sangat diperlukan bagi kesuksesan rantai pasokan yang berkelanjutan. Saat ini kelapa sawit dianggap sebagai penyebab utama deforestasi, di Asia Tenggara dan Afrika Barat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengembangkan sertifikasi minyak kelapa sawit berkelanjutan. Hingga saat ini, Roundtable for Sustainable Palm Oil (RSPO) telah berkontribusi mensertifikasikan sekitar 21% dari pasar kelapa sawit global.

Angka ini merupakan upaya tertinggi di antara semua program sertifikasi berkelanjutan. Sertifikasi merupakan cara utama yang digunakan oleh perusahaan untuk memenuhi komitmen mereka dalam menurunkan laju deforestasi dari rantai pasokan kelapa sawit. Permintaan terhadap produk bersertifikasi harus ditingkatkan untuk mendorong meningkatnya pasokan yang bersertifikasi. Negara dan perusahaan konsumen harus juga berkomitmen untuk membeli kelapa sawit bersertifikasi. Pada saat yang sama, program sertifikasi minyak kelapa sawit dan penerapannya harus diperkuat untuk meningkatkan integritas dan mengurangi dampak lingkungan.

3. Meningkatkan skala program percontohan untuk intensifikasi penggembalaan ternak (cattle grazing)

Program-program percontohan di Amerika Latin menunjukkan bahwa metode-metode intensifikasi berkelanjutan yang dikelola dengan baik dapat meningkatkan hasil panen dan keuntungan di sistem peternakan, dan pada saat yang sama dapat menambah cadangan lahan dan mengurangi tekanan untuk deforestasi. Permintaan akan daging sapi semakin meningkat, sedangkan produksi daging sapi juga mengakibatkan meningkatnya deforestasi daripada deforestasi yang dihasilkan oleh gabungan dari kedelai, minyak kelapa sawit, kayu serta kertas dan pulp. Investasi yang lebih besar juga diperlukan untuk memperluas program-program percontohan yang ada secara signifikan dan melakukan intensifikasi kepada skala yang lebih luas. Harus ada upaya untuk mengatasi keterbatasan jumlah tenaga kerja berkualifikasi, kebiasaan dan perilaku yang sudah mendarah daging, serta biaya di muka, agar biaya produksi dapat diturunkan dengan meningkatnya skala intensifikasi. Pada saat yang sama diperlukan dukungan bagi penegakan hukum serta pengelolaan dan perlindungan hutan untuk memberantas penebangan hutan secara ilegal dan untuk mengarahkan kembali insentif program-program yang mendorong produksi daging sapi yang masih memberikan hasil yang rendah.

4. Meningkatkan hasil panen para petani kecil kelapa sawit dan kakao secara berkelanjutan

Jutaan hektar lahan dapat diselamatkan dari deforestasi jika kesenjangan hasil yang diterima oleh para petani kecil kelapa sawit dapat teratasi. Lebih dari sepertiga kelapa sawit dihasilkan oleh para petani kecil yang seringkali kurang memiliki akses terhadap kredit, teknologi dan pelatihan. Penyediaan bantuan teknis dan finansial sangat berpotensi untuk meningkatkan hasil panen petani kecil agar dapat memenuhi standar global tanpa menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan. Jika dikelola dengan baik, peningkatan produktivitas ini dapat membebaskan lahan bagi jenis tanaman lainnya, bahkan untuk reforestasi. Agar tujuan ini tercapai, hambatan investasi yang menghalangi pengadopsian praktik-praktik terbaik harus diatasi. Agregasi yang lebih besar, manajemen risiko dan pelatihan dapat membantu meningkatkan hasil panen di perkebunan milik petani kecil. Solusi yang serupa sangat diperlukan guna mengatasi kesenjangan hasil panen dan mendukung intensifikasi berkelanjutan, juga untuk mengurangi tekanan terhadap hutan yang diakibatkan oleh produksi kakao di Afrika Barat.

5. Mencapai produksi kedelai berkelanjutan di Amerika Latin

Inisiatif-inisiatif multi-pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk mengatasi masalah pengalihan fungsi lahan yang terjadi akibat produksi kedelai di Amerika Latin. Permintaan global terhadap kedelai semakin bertambah dan produksi kedelai pun meningkat dengan cepat. Kedelai merupakan salah satu penyebab utama perusakan ekosistem alami di kawasan tersebut. Di Brazil saja kedelai telah bertanggung jawab atas deforestasi di 29 juta

hektar hutan alam dan ekosistem Cerado pada tahun 1990–2010. Oleh Karena itu, perlu upaya kerja sama yang didukung oleh perusahaan, masyarakat sipil dan pemerintah untuk memastikan bahwa produksi kedelai dapat dilakukan tanpa meluasnya pengalihan fungsi lahan.

6. Mempercepat pelaksanaan program-program yurisdiksi

Banyak yurisdiksi untuk hutan tropis – baik pada tingkat nasional maupun sub-nasional – sudah mulai mendefinisikan dan menjalankan program-program iklim dan hutan yang mengintegrasikan perencanaan lahan, pengelolaan hutan berkelanjutan dan produksi komoditas untuk membangun pedesaan secara berkelanjutan. Secara bersama-sama, yurisdiksi ini mencakup 10% (daging sapi) dan 40% (kedelai) produksi global komoditas yang berisiko bagi hutan. Hasil awal dari upaya ini nampak menjanjikan, namun masih perlu untuk memperkuat dan mempercepat upaya-upaya dan dukungan lebih lanjut dari sektor publik dan swasta. Program yurisdiksi yang lebih maju akan menjadi model bagi negara dan kawasan lain, dengan harapan agar semakin banyak komitmen dari sektor swasta penghasil komoditas untuk bergabung ke dalam program-program yang dibina oleh pemerintah.

7. Mengatasi konflik lahan, menjamin kepemilikan dan hak atas lahan

Terdapat korelasi yang tak terbantahkan antara perlindungan hak atas lahan dan konservasi hutan. Di banyak negara hutan tropis, ketidakpastian mengenai pendaftaran dan kepemilikan lahan menghambat investasi dalam praktik-praktik pengelolaan lahan yang lebih berkelanjutan. Konflik lahan dan klaim atas lahan yang tumpang tindih, misalnya konsesi pertanian yang diberikan kepada masyarakat dapat memicu terjadinya deforestasi. Walaupun sebetulnya, penetapan kepemilikan lahan yang sah sangat relevan bagi lahan yang sebelumnya pernah ditempati oleh masyarakat adat dan masyarakat setempat. Penelitian di Amerika Latin menemukan bahwa tingkat deforestasi sekitar 6 dan 350 kali lebih rendah di kawasan hutan yang secara sah diakui sebagai hutan milik masyarakat adat dan masyarakat setempat. Oleh karena itu, akselerasi pendaftaran atas kepemilikan dan status lahan sangat diperlukan selain itu, mekanisme resolusi konflik secara efektif dan adil untuk mengatasi klaim tumpang tindih kepemilikan lahan juga diperlukan.

8. Memobilisasi permintaan akan komoditas deforestation-free di pasar yang berkembang (emerging markets)

Emerging markets merupakan importir terbesar komoditas yang dapat menjadi berisiko bagi kawasan hutan. Oleh karena itu, keterlibatan mereka sangat penting bagi kesuksesan upaya zero-deforestation. Di ranah global, Tiongkok merupakan importir terbesar kedelai dan produk-produk kertas dan pulp, importir ketiga terbesar untuk minyak kelapa sawit, dan diprediksi akan menjadi importir kedua terbesar untuk daging sapi dalam lima tahun mendatang. India merupakan importir produk minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Bertambahnya inisiatif pada emerging economies mengindikasikan kesiapan untuk melibatkan serta meningkatkan koordinasi dan kerja sama antara para pemangku kepentingan di negara-negara konsumen dan produsen. Para pemangku kepentingan rantai pasokan komoditas dituntut untuk mendukung dan terlibat lebih lanjut bersama perusahaan dan pemerintah Tiongkok dan India untuk mendorong rantai pasokan yang lebih berkelanjutan.

9. Mengarahkan kembali pembiayaan untuk rantai pasokan deforestation-free

Pembiayaan yang tersedia bagi produksi komoditas berkelanjutan saat ini memperkecil jumlah investasi yang dikerahkan untuk produksi pertanian tradisional. Oleh karena itu, aliran pembiayaan yang ada sebaiknya diarahkan kembali kepada produksi pertanian yang berkelanjutan. Pergeseran ke arah komoditas pertanian deforestation-free dapat menciptakan peluang investasi baru dan menguntungkan, serta memitigasi reputasi risiko dan aset-aset terlarut. Kriteria investasi dan kebijakan manajemen risiko yang tepat, digabung dengan reformasi subsidi, terutama dalam bentuk kredit pertanian, dapat membantu upaya ini. Namun sayangnya, investasi untuk produksi berkelanjutan seringkali dihambat oleh risiko asing, biaya di muka, dan terbatasnya pemahaman mengenai karakteristik regional. Pembiayaan khusus publik dan impact investment yang mencakup biaya dan risiko diperlukan untuk beralih kepada pengelolaan praktik-praktik pertanian yang berkelanjutan secara lebih baik untuk menguji model pembiayaan inovatif.

10. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan deforestasi dan data rantai pasokan

Banyak kemajuan telah dicapai dalam beberapa dekade terakhir dari segi ketersediaan informasi mengenai deforestasi dan berkurangnya lahan hutan. Akan tetapi, perusahaan rantai pasokan dan pemangku kepentingan lainnya baru mulai mengembangkan sistem yang efektif dalam menggunakan informasi ini untuk mendukung pelaksanaan komitmen zero-deforestation. Selain itu, inisiatif-inisiatif masyarakat sipil dan teknologi pemetaan yang lebih canggih masih mengarah kepada pemantauan yang lebih baik di negara-negara seperti Brazil dan Indonesia, sedangkan upaya lebih lanjut masih diperlukan untuk memajukan secara penuh menangkap potensi untuk mendukung keputusan terkait pemanfaatan lahan secara berkelanjutan. Jumlah data yang harus dikumpulkan dan dibuka kepada publik harus ditambah agar pemerintah dan perusahaan dapat menargetkan dan memantau kegiatan mereka secara lebih efektif. Definisi-definisi, termasuk definisi “hutan” dan “zero net deforestation” juga perlu disepakati untuk memastikan perbandingan dan pertanggung jawaban antar rantai pasokan.

Commodities and Forests Agenda 2020 merangkum area-area yang paling mendesak untuk ditindaklanjuti dalam menurunkan laju deforestasi dari rantai pasokan pertanian global. Rencana aksi konkrit juga perlu dirancang agar sesuai dengan kondisi setempat dan rencana tersebut harus mencakup prioritas nasional dan regional. Terlebih lagi, jika kita ingin mencapai keberlanjutan jangka panjang, area-area tersebut di atas harus diperkuat melalui upaya-upaya untuk menyokong pembangunan berkelanjutan bagi masyarakat rural yang berlokasi di tepian hutan tropis serta upaya-upaya untuk mentransformasi pola konsumsi demi mengurangi dampak buruk rantai pasok pertanian. Walaupun begitu, pemahaman tentang pentingnya penanganan masalah-masalah jangka panjang ini harus segera ditangani dan tidak seharusnya menjadi alasan untuk menunda pengambilan tindakan atas komoditas dan agenda kehutanan.



COMMITTED TO
IMPROVING THE STATE
OF THE WORLD

World Economic Forum (WEF) menjadi tuan rumah sekretariat TFA 2020 di Jenewa, Swiss. Saat ini TFA 2020 memiliki lebih dari 100 mitra dari pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil. Aliansi ini terbuka untuk semua institusi yang memiliki tujuan serupa, terutama untuk pemerintah negara tropis, institusi-institusi keuangan, serta perusahaan-perusahaan pertanian dan barang konsumsi yang terkait dengan minyak kelapa sawit, kedelai, daging sapi, kertas dan pulp, serta cocoa. Untuk informasi lebih lanjut mengenai TFA 2020 kunjungi www.tfa2020.org atau hubungi kami di tfa2020@weforum.org.

The World Economic Forum, committed to improving the state of the world, is the International Organization for Public-Private Cooperation.

The Forum engages the foremost political, business and other leaders of society to shape global, regional and industry agendas.

World Economic Forum
91-93 route de la Capite
CH-1223 Cologny/Geneva
Switzerland

Tel.: +41 (0) 22 869 1212
Fax: +41 (0) 22 786 2744

contact@weforum.org
www.weforum.org